RENCANA STRATEGIS
(TAHUN 2012 – 2017)

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintahNya serta diberikan kesempatan sebagai abdi Negara untuk melayani masyarakat, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Rencana Strategis 2012 – 2017, dalam lingkup Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu1 s/d 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubngan, Komunikasi dan Informatika, disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk dijamin adanya konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (RPT), sehingga dalam penyelenggaraan jasa transportasi, informasi dan telekomunikasi pada akhirnya akan mewujudkan suatu kegiatan perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara terpadu dan sinergi dengan sektor lainnya.

Penyusunan dokumen Perencanaan Stratejik (Renstra) juga untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dokumen Perencanaan Stratejik (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 yang telah disusun ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 8 Oktober 2012

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH

Drs. MUZAKKIR, M.Si
Pembina Tk.I/ 19620714 198607 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2
DAFTAR ISI..... 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..... 4
1.2. Landasan Hukum..... 5
1.3. Maksud dan Tujuan..... 8
1.4. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD..... 11
2.2. Sumber Daya SKPD..... 13
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD..... 16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... 28

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD..... 34
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 36
3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda Aceh..... 42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 42
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... 43

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD..... 44
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..... 45
4.3. Strategi dan Kebijakan..... 46

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 48

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... 51

BAB VII PENUTUP..... 52
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh , Dishubkominfo sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubngan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh yang merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dishubkominfo telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Dishubkominfo yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dishubkominfo (Renja SKPD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017, sehingga Renstra Dishubkominfo Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan Renstra Dishubkominfo Kota Banda Aceh adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dishubkominfo. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJMD untuk menjamin terciptanya sinergitas dan

sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kota Banda Aceh untuk kurun lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana strategis Dishubkominfo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan
    - Nomor : 28 Tahun 2010
    - Nomor : 0199/M PPN/04/2010
    - Nomor : PMK 95/PMK 07/2010

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029;
28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 - 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dishubkominfo Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam pelasanaan pembangunan bidang Perhubngan, Komunikasi dan Informatika dan *stakeholders* lainnya di dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dishubkominfo Kota Banda Aceh disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dishubkominfo Kota Banda Aceh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBK.
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Maupun Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada

lingkup Dishubkominfo agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dishubkominfo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dishubkominfo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dishubkominfo Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 adalah untuk :

1. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani Indonesia.

2. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh *stakeholder*.

3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dishubkominfo

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dishubkominfo Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
  - 2.1.1. Tugas dan Fungsi
  - 2,1,2. Struktur organisasi

2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda Aceh
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.4. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan, bidang perparkiran, bidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang pengembangan sistem informatika;
c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam kota Banda Aceh di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan, bidang perparkiran, bidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang pengembangan sistem informatika;
d. pembinaan teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan, bidang perparkiran, bidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang pengembangan sistem informatika;
e. pengawasan dan pengendalian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan, bidang perparkiran, bidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang pengembangan sistem informatika;

f. penelitian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan, bidang perparkiran, bidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang pengembangan sistem informatika;
g. pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan search and resque di Kota Banda Aceh;
h. pembinaan UPTD ; dan
i. Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan petunjuk Walikota.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
   1. Sub Bagian Keuangan
   2. Sub Bagian Umum
   3. Sub Bagian Kepegawaian

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
   1. Seksi manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
   2. Seksi Angkutan dan Terminal
   3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan, membawahi
   1. Seksi lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan
   2. Seksi Pelabuhan
   3. Seksi Pengawasan Keselamatan Pelayaran

e. Bidang Perparkiran, membawahi :
   1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi
   2. Seksi Operasional dan Pengutipan
   3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

f. Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, membawahi :
   1. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi

2. Seksi Kelembagaan dan Komunikasi Sosial
3. Seksi Pos dan Telekomunikasi

g. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, membawahi :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
2. Seksi Aplikasi dan Pemeliharaan Teknologi Informasi

h. Kelompok Jabatan Fungsional

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh disajikan dalam Daftar Lampiran I.

2.2. Sumber Daya SKPD

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Dishubkominfo Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dishubkominfo Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	3	-	3	
3	IV/a	1	1	2	
4	III/d	12	3	15	
5	III/c	13	3	16	
6	III/b	16	7	23	
7	III/a	4	-	4	
8	II/d	6	4	10	
9	II/c	3	-	3	
10	II/b	23	7	30	
11	II/a	18	4	22	
12	I/c	1	-	1	
	Jumlah PNS	**101**	**29**	**130**	
	Non PNS				

13	Peg Honorer	4	-	4	
14	Peg. Kontrak	26	2	28	
	Jumlah Non PNS	**30**	**2**	**32**	
	JML PNS + NON PNS	**131**	**31**	**162**	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah PNS dan Non PNS Dishubkominfo Kota Banda Aceh sebanyak 162 orang. (*data okt 2012*)

Tabel .2.2
Jumlah Pegawai Dishubkominfo Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. a	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	5
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	17
5	Kepala UPTD	IV. a	3
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	3
	Jumlah	**30**	

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Dishubkominfo Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	6
2	S 1	31
3	D IV	-
3	D III	12
4	SLTA/Sederajat	80
5	SLTP/Sederajat	1
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	**130**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Dishubkominfo Kota Banda Aceh pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 6. orang, tingkat S1 sebanyak 31 orang, tingkat D.III 12 orang, tingkat SLTA sebanyak 80 orang, tingkat SMP 1 orang jumlah keseluruhan PNS 130 orang. (*data okt 2012*)

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Dishubkominfo Menurut jenjang pendidikan struktural

No.	**Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural**	**Jumlah orang**
1	S pamen / PIM - II	-
2	S pama / PIM - III	9
3	Adum / PIM - IV	23
jumlah		32

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah ketersediaan barang-barang inventaris Dishubkominfo Kota Banda Aceh untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan pada Dishubkominfo Kota Banda Aceh. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK, APBA, APBN dan juga bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut

Tabel 2.5.
Rekapitulasi Aset Dishubkominfo Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh

No	**Uraian**	**Unit**	
1.	Tanah	7	persil
2.	Peralatan dan Mesin		
	a. Alat-alat angkutan	32	Unit
	b. Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.879	unit
3	Gedung dan Bangunan		
	- Bangunan Gedung	57	unit

No	Uraian	Unit	
4	Jalan Irigasi dan Jaringan		
	a. Jaringan Listrik	12	Jaringan
	b. Jaringan Telpon	6	jaringan

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan, Bidang Perparkiran, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi serta Bidang Pengembangan Sistem Informasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, sampai dengan saat ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan anatara lain :

1. Uji Kelayakan Sarana Kendaraan Bermotor untuk menjamin Keselamatan Penumpang dan kendaraan pada saat beroperasi di jalan dengan melakukan KIR pengujian kenderaan bermotor untuk penertiban operasional kenderaan yang laik jalan.
2. Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal dengan melakukan pelayanan publik, pengawasan dan pemeliharaan terminal Penumpang.
3. melakukan Pelayanan publik, pengawasan dan pemeliharaan pada Pelabuhan Penyeberangan.
4. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas melalui penyediaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas untuk mengoptimalkan fungsi komunikasi lalu lintas.
5. Pengadaan Marka Jalan
6. Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir dalam rangka menjamin keselamatan kerja juru parkir melalui asuransi kecelakaan juru parkir.
7. Penilaian Lokasi, Potensi dan Target Retribusi 200 titik (survey)
8. Melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas serta mengoptimalkan fungsi traffic light dalam Kota Banda Aceh.
9. Pengenalan IT bagi para siswa SDN 54 Banda Aceh
10. Pelatihan komputer dan pengenalan IT bagi Guru SDN 54 Banda Aceh

11. Pelatihan penggunaan perangkat lunak legal dan FOSS (Free Open Source Software) bagi SKPD se-Kota Banda Aceh selama 1 (satu) bulan.
12. Melalui kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi yaitu meningkatkan informasi bagi masyarakat melalui penyediaan jaringan website gampong, diantaranya telah membangunan /mengembangkan Website gampong Setui Kecamatan Meuraxa pada tahun 2011 dengan dana APBK (melalui dana Aspirasi Anggata Dewan)
13. Penyebarluasan Informasi tetatang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yaitu penyediaan informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah melalui baliho, spanduk, siaran radio, siaran televisi dan jasa muatan berita koran.
14. Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait dan lintas sektoral.

Untuk melihat Review Pencapaian kinerja pelayanan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dapat dilihat pada lampiran II, dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dapat dilihat pada lampiran III.

Pelaksanaan pembangunan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah memiliki 1 (satu) unit terminal penumpang terpadu type A melayani trayek AKAP dan AKDP jurusan Timur- Barat-Selatan yang terletak di Jln DR.Mr.Tgk.H.Mohd. Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata dibangun secara bertahap oleh satker BRR (pelaksanaan pembangunan tahun 2006 s/d 2008), dan juga memiliki 1 (satu) unit terminal AKDP jurusan Timur – Utara dan Tenggah yang terletak di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata dan terminaL Angkutan Kota yang terletak di Gampong Keudah kec. Kuta Raja. Untuk melayani warga kota yang menggunakan jasa terminal tersebut diatas secara optimal maka perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana penunjang lainnya serta pemeliharaan secara berkala.

Kondisi sarana dan frasarana AKAP, AKDP dan Angkut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
KONDISI FASILITAS TERMINAL

No.	Uraian/Fasilitas	Luas/Unit	Jumlah	Keterangan
1	Terminal Penumpang Type A Fasilitas Utama : 1. Luas Lahan 2. Kantor 3. Ruang Tunggu Kedatangan AKAP 4. Ruang Tunggu Keberangkatan AKAP 5. Ruang Tunggu Kedatangan AKDP 6. Ruang Tunggu Keberangkatan AKDP 7. Ruang Tunggu Pengantar / Penjemput 8. Area Parkir Kedatangan AKAP 9. Area Parkir Keberangkatan AKAP 10. Area Parkir Kedatangan AKDP 11. Area Parkir Keberangkatan AKDP 12. Area Parkir Pengantar / Penjemput 13. Area Parkir Angkot / Taksi 14. Menara Pengawas 15. Loket Penjualan Tiket 16. Rambu Lalu Lintas Fasilitas Penunjang : 1. Toilet 2. Mushalla dan Tempat Wudhu 3. Pos Jaga dan Gerbang 4. Rumah Genset 5. Sclupture Papan Nama Terminal 6. Saluran Drainase 7. Lampu Penerangan 8. Kios dan Kantin 9. Klinik Kesehatan 10. Ruang Informasi dan Pengaduan 11. Pagar Keliling	 5 Ha 1.164 M^2 524 M^2 908 M^2 608 M^2 328 M^2 1.094 M^2 1.100 M^2 346 M^2 1.090 M^2 346 M^2 26.838 M^2 6.837 M^2 1 Unit 44 Unit 25 Unit 6 Unit 116 M 54 M^2 10 M^2 1 Unit 5.143 M^2 1 Paket 8 Unit 1 Unit 1 Unit 1.006 M^2	1 unit	kondisi Baik
2	Terminal Penumpang AKDP Type B. Fasilitas Umum 1. Luas Lahan 2. Kantor terminal/operasional 3. Loket 4. Area Parkir Fasilitas Penunjang 1. Toilet 2. Mushalla dan tempat wudhuk 3. Pos jaga dan pos retribusi 4. Landscape 5. Saluran Drainase 6. Pagar tembok 7. Penerangan	 4.300 M2 1 UNIT 37 UNIT 3.700 M2 4 UNIT 1 UNIT 2 UNIT - 510,4 M 333 M 6 TITIK	1 unit	Kondisi baik

3	Terminal Angkutan Type C Fasilitas Utama : 1. Luas Lahan 2. Kantor Terminal 3. Area Parkir 4. Pembatas Jalur Fasilitas Penunjang : 1. Toilet 2. Mushalla dan Tempat Wudhu 3. Pos Jaga dan Pos Retribusi 4. Pos Retribusi II & Gapura Pintu masuk 5. Landscape 6. Saluran Drainase 7. Pilar Penunjuk Arah 8. Tiang Pada Pos Retribusi / Pintu Keluar 9. Halte 10. Pagar BRC 11. Penerangan	 7.790 M^2 1 Unit 9.030 M^2 20 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 10 M^2 150 M^2 510,4 M^2 10 Unit 2 Unit 10 Unit 333 M^2 17 Titik	1 unit	kondisi Baik

Sumber : Bidang LLAJ Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Jumlah rambu lalu lintas setiap tahun terus bertambah (termasuk yang direhab) yang terdiri rambu tiang tunggal, rambu RPPJ dan Rambu Type F, Jumlah marka setiap tahun terus bertambah Kondisi arus lalu-lintas dalam Kota Banda Aceh saat ini sering terjadi kepadatan saat jam-jam sibuk pada titik-titik tertentu, baik pagi, siang maupun sore hari, disamping itu juga sering terjadinya crossing pada beberapa titik u-turn dan antrian panjang pada titik persimpangan traffig light. Sarana pengaturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada saat ini belum memadai seperti traffic light, warning light dan fasilitas rambu lalu lintas serta fasilitas perlengkapan jalan lainnya (termasuk yang dilakukan pengecatan kembali untuk marka yang telah pudar) yang terdiri marka putus – putus, Marka lambang, marka utuh, marka chevpron, marka zebra cross, marka pita penggaduh dan marka yellow box. Jumlah Traffic Light dari tahun ke tahun tetap, namun setiap tahun terdapat titik trafic light yang dilakukan pergantian baru atau rehab. Selanjutnya perlu dilakukan perawatan, peremajaan dan pergantian secara berkala fasilitas perlengkapan jalan yang berada di Kota Banda Aceh.

Kondisi Fasilitas Lalulintas yang tersedia sampai dengan saat ini data dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Kondisi Rambu Lalu Lintas

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Rambu	917 Unit	967 Unit	1017 Unit	1067 Unit	1368 Unit
2.	Jumlah Marka	1340 M^1	1552 M^1	1750 M^1	2235 M^1	19396 M^1
	Warning Light	19 Titik	19 Titik	19 Titik	19Titik	19 Titik
3.	Jumlah Traffic Light	16 Titik	16 Titik	16 Titik	16 Titik	16 Titik

Sumber : Bidang LLAJ Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Saat ini Kota Banda Aceh telah melayani 10 rute trayek untuk angkutan kota dengan 3(tiga) perusahan Angkot yaitu CV.Ampera, CV. Matahari dan FA. PMO, total jumlah armada 381 unit dengan penerbitan kartu pengawasan dua kali dalam setahun dan 4 rute trayek untuk angkutan damri dengan 12 unit armada, dengan penerbitan kartu pengawasan1 kali dalam setahun. Dalam penerbitan izin trayek terjadi penurunan hal ini disebabkan bahwa masyarakat sudah tidak banyak lagi menggunakan jasa Angkutan Kota serta beralih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas, dan juga disebabkan oleh umur Angkot yang sudah tua, tidak adanya jadwal keberangkatan/kedatangan yang jelas, dan tidak semua trayek menjangkau daerah/kawasan pemukiman. Faktor tersebut menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan kota menurun maka dengan sendirinya angkutan kota tersebut berangsur-angsur berkurang karena angkutan tersebut sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan operasionalnya dalam melayani trayek tersebut.

Tabel 2.8
Data Kondisi Trayek Angkutan Umum Penumpang Kota Banda Aceh

No.	Trayek	Panjang Trayek	Jumlah Armada	Keterangan
1	Keudah - Darussalam	7 Km	112 Unit	
2	Keudah – Lampineung	4 Km	-	Thn 2011 sudah tidak ada armada yg melayani trayek
3	Keudah – Ulee Kareng	6 Km	27 Unit	
4	Keudah – Lampeuneurut	6 Km	41 Unit	
5	Keudah – Ketapang Dua	7 Km	47 Unit	

6	Keudah – Krueng Cut	5 Km	23 Unit
7	Keudah – Tanjong	5 Km	16 Unit
8	Keudah – Lamteumen	5 Km	18 Unit
9	Keudah – Lueng Bata	3 Km	9 Unit
10	Keudah – Mibo	5 Km	-
11	Keudah – Lamjabat / Surien	5 Km	-
12	Keudah – Syiah Kuala	4 Km	-
13	Keudah – Ulee Lheue	6 Km	40 Unit
14	Ulee Lheue – Deah Glumpang	4 Km	-
15	Keudah – Alue Naga	5,5 Km	-
16	Keudah – Lamgugop	5 Km	-
17	Keudah - Lamlagang	4 Km	-

Sumber : Bidang LLAJ Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Tabel 2.9
Banyaknya Perusahaan, Trayek, Jenis, Jumlah dan Daya Angkut Kenderaan Umum di Kota Banda Aceh

No	Nama Perusahaan	Trayek	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Daya Angkut Perunit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	CV. Ampera	- Terminal APK. Keudah – Darussalam, PP	Mopen	87 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Ulee Kareng, PP	Mopen	17 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Lampeunerut, PP	Mopen	21 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Ketapang Dua, PP	Mopen	27 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Lamteumen, PP	Mopen	13 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Surien, PP	Mopen	4 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Krueng Cut, PP	Mopen	18 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Tanjong, PP	Mopen	16 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Lueng Bata, PP	Mopen	9 Kend.	12 Orang
2	CV. Matahari	- Terminal APK. Keudah – Ketapang Dua, PP	Mopen	25 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Darussalam, PP	Mopen	25 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Krueng Cut, PP	Mopen	5 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Lampeunerut, PP	Mopen	20 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Lamteumen, PP	Mopen	5 Kend.	12 Orang
		- Terminal APK. Keudah – Ulee	Mopen	10 Kend.	12 Orang

		Kareng, PP			
3	Fa. PMO	- Terminal APK. Keudah – Ulee Lheue, PP	Mopen	40 Kend.	12 Orang
4	Perum Damri	- Pusat Kota – Darussalam, PP	Mobis	6 Kend.	25 Orang
		- Pusat Kota – Unmuha, PP	Mobis	2 Kend.	25 Orang
		- Pusat Kota – Lampeunerut, PP	Mobis	2 Kend.	25 Orang
		- Pusat Kota – U-Turn BPBK Banda Aceh, PP	Mobis	2 Kend.	25 Orang
Jumlah				358 Kend.	

Sumber : Bidang LLAJ Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Tabel 2.10
Tabel 8. Jumlah Perusahaan Angkutan Umum di Kota Banda Aceh
Tahun 2009 s/d 2011

No.	Perusahaan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Perusahaan AKDP	16 Perusahaan	16 Perusahaan	16 Perusahaan
2	Perusahaan AKAP	3 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan
3	Perusahaan Angkutan Kota	3 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan

Sumber : Bidang LLAJ Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Tabel 2.11
Data Jalan dan Persimpangan;

No	Uraian Data	Volume	Keterangan
1	Persimpangan Utama	14 Titik	
2	Jalan a. Jalan Nasional b. Jalan Propinsi c. Jalan Kota d. Jalan Desa	 11,72 KM 29,28 KM 337,57 KM 96,3 KM	

Sumber : Bidang LLAJ Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Tabel 2.12
Data Kendaraan Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d Tahun 2011

N0	Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Persimpangan Utama	14 Titik				
	Kendaraan Bermotor : a. Sedan, Sedan Station dan sejenisnya	3.677 Unit	4.118 unit	3.402 unit	4.419 unit	4.552 unit
	b. Jeep dan sejenisnya	2.254 Unit	2.950 unit	3.155 unit	3.427 unit	3.530 unit
	c. St. Wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya	7.130 Unit	10.935 unit	10.934 unit	13.819 unit	14.234 unit
	d. Bus, Microbus dan	1.248 Unit	1.248 unit	1.213 unit	1.222 unit	1.258 unit

	sejenisnya e. Pick up, Truck Deliverivan, D. Cabin, Dump Truck, Truck Tangki dan sejenisnya f. Sepeda Motor Roda Dua dan Roda Tiga g. Alat-alat Berat	5.739 Unit 68.831 unit 68 unit	6.585 unit 86.134 unit 84 unit	6.424 unit 111.529 unit 97 unit	7.496 unit 115.694 unit 109 unit	7.721 unit 119.165 unit 112 unit
2	Kendaraan Wajib Uji Umum	5.218 Unit	2.620 unit	2.464 unit	2.475 unit	3.653 unit
3	Kendaraan Wajib Uji TU	9.757 Unit	2.259 unit	2.364 unit	2.238 unit	2.948 unit

Sumber : Bidang LLAJ Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Tabel 2.13
Pelayanan Pengujian Kenderaan Bermotor di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 s/d 2011

No	Jenis Kendaraan	Tahun 2007			Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011		
		Taman Kend. (Unit)	Jumlah Kend. yang Diuji (Unit)	%	Taman Kend. (Unit)	Jumlah Kend. yang Diuji (Unit)	%	Taman Kend. (Unit)	Jumlah Kend. yang Diuji (Unit)	%	Taman Kend. (Unit)	Jumlah Kend. yang Diuji (Unit)	%	Taman Kend. (Unit	Jumlah Kend. yang Diuji (Unit	%
1	Mobil Penumpang Umum	617	1.141	92,46	712	1.362	95,65	436	791	90,71	357	599	83,89	477	645	67.61
2	Bis	896	1.606	89,62	820	1.437	87,62	968	1.613	83,32	980	1.660	84,69	1.187	1.679	70.72
3	Mobil Barang	4.032	7.010	86,93	3.185	6.298	98,87	4025	7.240	89,94	4.012	7.165	89,29	4.167	9.333	111,99

Sumber : UPTD-PKB Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kir kendaraan di Kota Banda Aceh terjadi penurunan terutama pada tahun 2011, hal ini memungkinkan karena kendaraandapat melalukan uji kir pada daerah lain.

Kota Banda Aceh juga memiliki 1 (satu)satu unit Pelabuhan penyeberangan ASDP yang terletak di pantai Ulee Lheue Jalan Iskandar muda Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa untuk melayani transportasi penyeberangan dengan aktifitas keberangkatan dari Banda Aceh ke Sabang dan Banda Aceh ke Pulo Aceh atau sebaliknya yang merupakan bantuan UNDP Pasca Tsunami, Pengguna jasa Transportasi ASDP terus meningkat baik dari masyarakat lokal, Nasional maupun Mancanegara , Oleh sebab itu kita terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya serta pemeliharaan secara berkala melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (tahun 2012 sampai tahun 2017).

Tabel 2.14
KONDISI FASILITAS TERMINAL ASDP (Pelabuhan Ulee lheue)

No.	Uraian/Fasilitas	Luas/Unit	Jumlah	Keterangan
1	Pelabuhan Penyeberangan ASDP		1 unit	kondisi Baik
	1. Gedung kantor	260 M		
	2. Ruang tunggu penumpang	400 M		
	3. Ruang kedatangan	200 M		
	4. Tempat duduk ruang tunggu	185 Seat		
	5. Penimbangan kendaraan	1 unit 1 unit		
	6. Jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way)			
	7. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa			
	8. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker)			
	9. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi			
	10. Akses jalan			
	11. Fasilitas pemadam kebakaran			
	12. Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal			
	13. Alur pelayaran			
	14. Fasilitas sandar kapal			
	15. Perairan tempat labuh			
	16. Kolam pelabuhan untuk kebutuhan standar dan olah gerak kapal			

Sumber : Bidang LLASDP Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Tabel 2.15
Data Kapal dan Kapasitas Angkut

No	Uraian Data	Volume	Keterangan
1	KM. Pulo Rondo	236 Seat 188 GT	
2	KM. Bahari Express	241 Seat 163 GT	
3	KM. Tanjung Burang	300 Seat 16 Kend. Campuran 540 GT	
4	KM. Simeuleu	385 Seat 22 Kend. Campuran 370 GT	

Sumber : Bidang LLASDP Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Tabel 2.16
Jaringan Lintas Pelayaran

No	Uraian Data	Volume	Keterangan
1	Lintas Ulee Lheue – Balohan	17 Mil-Laut	
2	LIntas Ulee Lheue - Lamteng	10 Mil-Laut	

Sumber : Bidang LLASDP Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Tabel 2.17
Data Dermaga sungai

No	Uraian Data	Volume	Keterangan
1	Dermaga Beurawe	1 Unit	
2	Dermaga Keudah	1 Unit	
3	Dermaga Ikan Lampulo	1 Unit	
4	Dermaga Kuala Cakra	1 Unit	

Sumber : Bidang LLASDP Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Tabel 2.18
Jumlah perjalanan kapal

No	Uraian Data	Kapasitas	Keterangan
1	KMP Tanjung Buram	300 orang	Balohan-Ulee Lheue
2	KMP Simeulu	385 orang	Ulee Leheue-Lamteng
3	KMP BRR Aceh	360 orang	Ulee Lheue-balohan
4	KMP Pulo Rondo	236 orang	
5	KMP Bahari Expres	421 orang	

Sumber : Bidang LLASDP Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Masalah perparkiran terus dibenahi mengingat kondisi yang tidak berimbang antara jumlah kendaraan dengan fasilitas perparkiran, karena pada umumnya parkir yang digunakan sebahagian besar berupa badan jalan yang tersedia yang diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang semakin tinggi. Selain itu, akibat tingginya aktifitas masyarakat yang berasal dari luar Kota Banda Aceh dan tidak berimbangnya jumlah kendaraan dengan volume jalan yang tersedia, maka perlu segera diambil kebijakan tindak lanjut, seperti penertiban perparkiran pada badan jalan, dibangun lokasi parkir

kawasan dan perkantoran pemerintah/swasta, pusat pembelanjaan, dan tempat-tempat pelayanan publiknya diwajibkan membangun basemant perparkiran.

Tabel 2.19
Kondisi Perparkiran di Kota Banda Aceh Tahun 2007 s/d 2011

No.	Kegiatan	satuan	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Penambahan lokasi baru	Titik	50	25	25	12	25
2	Pengendalian parkir	Titik	125	150	175	187	212
3	Kontrak juru parkir	Orang	125	150	175	187	212
4	Bad nama parkir	Bad	125	150	10	187	275
5	Penertiban juru parkir	Orang	4	8	30	5	108
6	Surat teguran juru parkir	surat	12	15		20	65

Sumber : Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Bidang Kominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2009 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (Information Technology) dengan kapasitas yang sangat terbatas bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Aceh, Untuk Penyampaian Informasi dan Komunikasi secara cepat, tepat dan akurat kepada publik pemerintah Kota Banda Aceh telah mejalin hubungan Kerja sama yang baik dengan Media Massa yaitu Media Elektronik dan media Cetak serta melalui media informasi lainnya.

Dalam rangka meningkatkan informasi dan komunikasi Bidang Kominfo Kota Banda Aceh akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

a. Memperluas jaringan informasi sebagai upaya publikasi informasi publik yaitu dengan melakukan kerjasama penyebarluasan informasi publik yang dituangkan dalam MoU dengan 3 (tiga) SKPD (Disdukcapil, Dinkes dan Disperindagkop) dan 2 (dua) lembaga lain yaitu BI dan BPS Kota Banda Aceh
b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengadaan Running teks, baliho pemasukan jaringan telepon kabel dan fasilitas informasi lainnya ke terminal penumpang dan pelabuhan ASDP.
c. Pembangunan jaringan internet SKPK Pemerintah Kota Banda Aceh
d. Sinkronisasi jaringan TIK dengan jaringan lampu lalu lintas
e. Pembangunan data centre pemerintah Kota banda Aceh
f. Pengembgangan Aplikasi pendukung kerja SKPK pemerintah Kota Banda Aceh.
g. Peningkatan SDM bidang TIK(teknologi informasi dan komunikasi) melalui pelatihan bagi pegawai

Tabel 2.20

Data Bidang Komunikasi dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian Data	Volume	Keterangan
1	Alat Produksi Tower Transmisi Network Sumbagut Arnet Aceh	2 Titik	
2	<u>Tower BTS GSM/CDMA</u> a PT. Telkom b PT. Telkomsel c BTS PT Excelcomindo d BTS PT. Hutchison CP Telecomunication e BTS PT. Telkom Flexi f BTS PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	 1 Titik 38 Titik 14 Titik 5 Titik 4 Titik 1 Titik	
	g BTS. Indosat	9 Titik	
	h BTS. Smart	3 Titik	
3 4. 5. 6	Towor Jaringan Komunikasi data yang tersedia pada 8 SKPD +_ Kediaman Dinas Walikota Towor BTS Eks BPDE Nad dan Towor BTS Pendopo Lembaga Penyiaran Publik (LPP BRI) Radio Siaran Swata (FM) A PT. Radio Siaran Rizki Kontiki (101,2 FM) B PT. Radio Nikoya FM (106 FM) C PT. Radio Tree (94,5 FM) D PT. Radio Kiss (103,2 FM) E PT. Radio Prima (104,4 FM) F PT. Radio Megah (95,3 FM) G PT. Radio One (102,8 FM) H PT Jati (103,6 FM) I PT. Radio Suara Tosyibindo / Toss FM (93,3 FM) J PT. Radio Baiturrahman FM K PT. Radio RRI	9 Titik 2 Unit 1 siaran 11 siaran	
4	<u>Televisi</u> A Televisi Republik Indonesia (TVRI) B Aceh TV C Kuta Raja TV	3 Stasiun	
5	Media Cetak (Harian / Tabloit)	7 Buah	
6	Jasa Pos Titipan	6 18 Buah	

Sumber : Bidang PSI/Komtel Dishubkominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2011

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan kondisi existing, maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan 2012 -2017. Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh. Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
2. Peningkatan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
3. Peningkatan kualitas Pos dan Telekomunikasi
4. Peningkatan kualitas data/informasi
5. Peningkatan kualitas pelayanan perparkiran
6. Peningkatan kerjasama pembangunan
7. Peningkatan kualitas SDM
8. Peningkatan pembangunan ekonomi

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya diterapkan analisis SWOT.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strength dan weaknesses) dan kondisi eksternal organisasi (opportunities dan threats), maka kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang melekat baik pada pemerintah maupun masyarakat dapat diidentifikasikan atas keempat aspek positif dan negatif dari organisasi di dalam menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strenghs)

1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang

Kelemahan (weaknesses)

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
3. Tidak meratanya beban kerja
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

Peluang (Opportunity)

1. Letak geografis yang strategis
2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya
5. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi

Tantangan (threat)

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik
3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru
4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas
5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal

Pencermatan Lingkungan Strategik

Pencermatan Lingkungan Stratejik adalah untuk mencermati tentang **"kekuatan"** dan **"Kelemahan"** internal, **" Tantangan dan Peluang"** eksternal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, masa kini dan berorientasi yang diperkirakan akan muncul di masa depan .

Pencermatan Lingkungan Stratejik meliputi antara lain situasi dan kondisi awal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh (struktur, penempatan personil, efektifitas, kegiatan), efektifitas komunikasi antar unit, sumber daya dan pemberdayaannya, serta faktor-faktor lain yang mendukung terciptanya produk perencanaan yang berkualitas.

Tabel 2.21
Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI	**PLE**
Kekuatan (*Strengths*) 1. Tersedianya pegawai 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas 3. Adanya kerjasama antar staf yang baik 4. Tersedianya sarana kerja yang memadai 5. Adanya komitmen pimpinan 6. Tersedianya dana penunjang	**Peluang (*Opportunities*)** 1. Letak geografis yang strategis 2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih 3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya 5. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi
Kelemahan (*Weaknesses*) 1. Rendahnya motivasi kerja aparatur 2. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 3. Tidak meratanya beban kerja 4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian 5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi 6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.	**Tantangan (*Threats*)** 1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi 2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik 3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru 4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas 5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal.

Tabel 2.22
Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

No	Faktor-Faktor Internal Stratejik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
1.	**Kekuatan (*Strengths*)**				
	1. Tersedianya pegawai	15	4	60	I
	2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas	10	4	40	III
	3. Adanya kerjasama antar staf yang baik	5	4	20	IV
	4. Tersedianya sarana kerja yang memadai	5	3	15	V
	5. Adanya komitmen pimpinan	5	3	15	VI
	6. Tersedianya dana penunjang	10	4	40	II
2.	**Kelemahan (*Weaknesses*)**				
	1. Rendahnya motivasi kerja aparatur	10	3	30	III
	2. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	15	3	45	I
	3. Tidak meratanya beban kerja	5	3	15	IV
	4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian	5	2	10	VI
	5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi	10	4	40	II
	6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.	5	3	15	V
	JUMLAH	100			

Keterangan : R4 : Sangat menonjol, R3 : Menonjol, R2. kurang menonjol dan R1 : tidak menonjol.

Tabel 2.23
Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

No	Faktor-Faktor Internal Stratejik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
1.	**Peluang (*Opportunities*)**				
	1. Letak geografis yang strategis	5	3	15	IV
	2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih	10	3	30	II
	3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15	4	60	I
	4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya	10	3	30	III
	5. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi	10	3	30	V
2.	**Tantangan (*Threats*)**				
	1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi	5	4	20	IV
	2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik	10	4	40	III
	3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru	5	4	20	V
	4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas	10	4	40	II
	5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal	15	4	60	I
	JUMLAH	100			

Keterangan : R4 : Sangat menonjol, R3 : Menonjol, R2. kurang menonjol dan R1 : tidak menonjol.

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal (KAFI-KAFE)

- **Dari keenam kekuatan (Strenghtness) dalam analisis pencermatan internal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah;1). ketersediaan personil; 2). ketersediaan dana penunjang; 3). Tugas pokok dan fungsi yang jelas, 4).Kerjasama antar staf yang baik
- **Dari keenam kelemahan (Weaknesses) dalam analisis pencermatan Eksternal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah; 1). kemampuan profesional aparatur di bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika masih rendah ; 2). Pelaksanaan system dan mekanisme koordinasi belum efektif; 3). Rendahnya motivasi kerja aparatur; 4). Belum meratanya beban kerja.

- **Dari kelima Peluang (Opportunities) dalam analisis pencermatan Eksternal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah; 1). Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2). Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota; 3). Adanya dukungan dana/kegiatan dari Provinsi NAD; 4) Adanya donor dan NGO.
- **Dari kelima Tantangan (Threats) dalam analisis pencermatan Eksternal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah; 1). Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal; 2). Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas; 3). Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik; 4). Tidak konsistensinya penerapan regulasi.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh memiliki permasalahan antara lain:

1. Pembangunan sarana penunjang dan fasilitas perhubungan belum memadai.
2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ.
3. Masih rendahnya Kesadaran Pengguna jalan dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalu lintas Angkutan Jalan.
4. Keterbatasan ruang parkir dan Pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.
5. Bidang Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik belum memadai.
6. Kurangnya SDM Bidang Korespodensi (berita) dan TIK.
7. Belum Tersedia sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif.

3.1.1. Pembangunan sarana penunjang dan fasilitas perhubungan belum memadai.

Kondisi Pembangunan bidang LLAJ pada sarana terminal AKAP, AKDP dan Angkot sudah memenuhi stadar namun perlu pembangunan penunjang lainnya pada terminal AKAP dan AKDP seperti ruang Istirahat para supir dan bangunan perbengkelan. Kondisi bangunan pelabuhan penyeberangan Ulee lheu sudah sangat baik namum perlu penambahan fasilitas penunjang lainnya seperti bagunan perparkiran roda 2 untuk pengantar dan penjemput, penambahan rambu petunjuk dan penerangan dalam areal terminal pelabuhan. Bidang Pengujian Kenderaan Bermotor sampai dengan saat ini belum tersedia Balai pengujian yang representatif dan peralatan pengujian yang memadai, untuk saat ini masil melakukan uji laik jalan dengan cara manual.

3.1.2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ.

Kondisi arus lalu-lintas dalam Kota Banda Aceh saat ini sering terjadi kepadatan saat jam-jam sibuk pada titik-titik tertentu, baik pagi, siang maupun sore hari, disamping itu juga sering terjadinya crossing pada beberapa titik u-turn dan antrian panjang pada titik persimpangan traffig

light. Sarana pengaturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada saat ini belum memadai seperti traffic light, warning light dan fasilitas rambu lalu lintas serta fasilitas perlengkapan jalan lainnya (termasuk yang dilakukan pengecatan kembali untuk marka yang telah pudar) yang terdiri marka putus – putus, Marka lambang, marka utuh, marka chevpron, marka zebra cross, marka pita penggaduh dan marka yellow box. Jumlah Traffic Light dari tahun ke tahun tetap, namun setiap tahun terdapat titik trafic light yang dilakukan pergantian baru atau rehab.

3.1.3. Masih rendahnya Kesadaran Pengguna jalan dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalu lintas Angkutan Jalan

Kita sadari bahwa kesadaran masyakat dalam budaya antri masih sangat rendah begitu juga dengan hal dalam mematuhi Peraturan perundangan Lalu Lintas, hampir setiap saat kita temukan pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan parkir kendaraan pada badan jalan yang bukan diperuntukkan untuk parkir, dengan demikian angka kecelakaan lalulintas masih sangat tinggi dan kemacetan pada titik-titk tertentu serta kesemberautan lalu litas yang belum teratasi secara maksimal.

3.1.4. Keterbatasan ruang parkir dan Pertumbuhan kenderaan bermotor yang cukup tinggi.

Mengingat Kota Banda Aceh merupakan Ibukota propinsi yang juga sebagai pusat Pendidikan dan perdagangan, masalah perparkiran merupakan permasalahan yang sangat kompleks mengingat kondisi yang tidak berimbang antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan fasilitas perparkiran yang tersedia serta masyarakat kota maupun luar kota yang berkatifitas dalam kota semakin tinggi, maka perlu segera diambil kebijakan tindak lanjut, seperti penertiban perparkiran pada badan jalan, penataan parkir kawasan pada ruas jalan tertentu, dibangun lokasi parkir khusus atau basement pada perkantoran pemerintah/swasta, pusat pembelanjaan, dan tempat-tempat pelayanan publiknya.

3.1.5. Bidang Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik belum memadai.

Minimnya sarana komunikasi terutama unit siaran informasi berupa kendaraan roda empat dan fasilitas siaran lainnya, sehingga penyampaian

informasi tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan kota melalui unit siaran keliling tidak maksimal.

31.6. Kurangnya SDM Bidang Korespodensi (berita) dan TIK.

Sampai dengan saat ini bidang korepodensi belum ada tenaga/pegawai yang yang telah mengikuti Pendidikan Bidang Fotografer dan peliputan berita, juha sangat terbatasnya SDM yang mengelola TIK.

31.7. Belum Tersedia sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif.

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Bidang Kominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2009 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (Information Technology) dengan kapasitas yang sangat terbatas bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Aceh, sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif sampai dengan saat ini belum tersedia.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota

3.2.1 Telaah Visi

Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 yaitu: **Banda Aceh Model Kota Madani**. Kota Madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab.

Madani berasal dari bahasa Arab yang artinya menempati suatu tempat. Dari kata dasar ini kemudian terbentuk kata madinah yang berarti kota atau tempat tinggal sekelompok orang. Dalam perkembangan berikutnya, kata madani ini digunakan oleh orang Arab untuk menerjemahkan istilah civilization dalam Bahasa Inggris. Justru pada akhirnya kata madani yang berarti civilization yang sering dipakai dalam perbincangan kehidupan masyarakat dan negara.

Anwar Ibrahim mengartikan masyarakat madani sebagai sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Nurcholis Madjid mengartikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang berperadaban (ber-“madaniyyah”) karena tunduk dan patuh (dana-yadinu) kepada ajaran kepatuhan (din) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Dr. Alfitra Salamm, peneliti pada LIPI dan BP7 menginventarisasikan konsep masyarakat madani dari para cendekiawan se-Indonesia, konsep masyarakat madani tidak terlalu jauh berbeda dengan konsep civil society, yakni berintikan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tapi kalau civil society melulu bicara dalam paradigma politik, konsep masyarakat madani juga mengandung unsur keagamaan.

Cendekiawan Malaysia Profesor Naquib Al-Attas -- dalam diskusi bertema "Masyarakat Madani or Civil Society"-- berusaha mempresentasikan bahwa paradigma masyarakat madani lebih relevan untuk masyarakat ideal masa depan daripada konsep civil society. Istilah masyarakat madani yang dipopulerkan oleh Al Attas ini merupakan terjemahan dari kosa kata bahasa Arab, mujtama’ madani, yang secara etimologis mempunyai dua arti. Pertama, "masyarakat kota", karena madani adalah turunan dari kata bahasa Arab, madinah, yang berarti kota. Kedua, masyarakat yang berperadaban, karena madani adalah juga turunan dari kata bahasa Arab, tamaddun atau madaniyyah yang berarti peradaban. Maka dari nama ini, masyarakat madani bisa berarti masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.

Lebih lanjut, masyarakat madani harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1 Masyarakat yang beriman dan berakhlaq
2 Persatuan dan kesatuan umat, tidak fanatis terhadap ikatan-ikatan kesukuan
3 Tegaknya hak-hak asasi manusia dan tidak adanya kesewenang-wenangan
4 Egaliterisme, anti-feodalistik, anti-otoriterisme, ruang publik yang luas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan
5 Masyarakat yang memiliki hukum dan taat hukum, tidak barbarian, dan tegaknya supremasi hukum

6 Masyarakat yang inklusif, toleran dalam perbedaan, dan kemampuan untuk bekerjasama dalam menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan

7 Keadilan sosial bagi seluruh umat.

Demi terwujudnya sebuah kota madani perlu didukung oleh keberadaan dinas/lembaga/badan/kantor pemerintah yang memahami tugas dan fungsinya.

3.2.2 Telaah Misi

Upaya untuk mencapai visi dapat ditempuh dengan beberapa misi berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama Menuju Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah	
Tujuan: 1. Meluruskan kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Hadits 2. Meningkatkan kualitas iman 3. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik (Hayatan Thayyibah 4. Membangun kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat 5. Menciptakan masyarakat yang cerdas secara intelektual 6. Meningkatkan manajemen pengelolaan zakat, infaq dan sadaqoh (ZIS)	Sasaran: 1. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatnya ketaqwaan individu 3. Meningkatnya kualitas dan produktifitas hidup masyarakat 4. Terciptanya ketentraman dan kenyamanan masyarakat 5. Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang syari'at Islam 6. Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel
Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan publik 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Mengembangkan dan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) 5. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang baik 6. Memperpendek jalur birokrasi Pemerintahan 7. Pembentukan Program Kerja Pemerintah yang Aspiratf	Sasaran: 1. Meningkatnya profesionalisame aparatur pemeriksa dan terciptanya transparansi birokrasi, 2. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang memiliki Kompetensi, Kompetitif, Amanah, Profesional dan Bertanggung Jawab, 3. Terwujudnya Aparatur yang Disiplin dan Berintegritas 4. Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-Goverment 5. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, responsif, Akuntabel, efektif dan Efisien serta partisipatif 6. Terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien 7. Terbentuknya Program Pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat

Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan	
Tujuan: 1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis syariat 2. Meningkatkan peluang kesempatan kerja 3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk memperkuat ekonomi kerakyatan 4. Meningkatkan keterampilan UKM dan Industri Rumah Tangga 5. Meningkatkan promosi dan informasi peluang investasi daerah 6. Meningkatkan pelatihan dan ketrampilan kewirausahaan	Sasaran: 1. Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi 2. Meningkatnya peran masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja 3. Tersedianya jaringan pemasaran (networking marketing) , mutu packaging, dan keterampilan masyarakat 4. Terciptanya gampong yang mandiri one village one product 5. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi 6. Terciptanya jiwa enterpreneurship
Misi 4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya	
Tujuan: 1. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima, terjangkau dan bermutu 2. Menata sistem pendidikan yang berbasis islami 3. Melibatkan masyarakat dan tokoh adat dalam melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya dan adat-istiadat 4. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 5. Meningkatkan budaya baca masyarakat.	Sasaran: 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas. 2. Terciptanya program pendidikan diniyah pada sekolah dasar dan menengah 3. Tersedianya sarana dan prasarana budaya dan adat-istiadat Aceh dalam pengembangan bakat dan minat pelaku seni dan budaya 4. Tercapainya kualitas pendidikan sesuai SNP 5. Terciptanya masyarakat yang mampu mengakses informasi dan pengetahuan secara cepat dan mudah
Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Yang Islami	
Tujuan: 1. Menciptakan infrastruktur pariwisata yang Islami 2. Menggali dan melestarikan situs sejarah dan objek wisata 3. Mengembangkan promosi wisata 4. Meningkatkan persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh 5. Mendorong peran serta pihak ke tiga dalam mendukung promosi wisata	Sasaran: 1. Terciptanya infrastruktur pariwisata yang representatif dan berarsitektur ke-Acehan pada bangunan umum dan pemerintahan 2. Terpeliharanya situ peninggalan bersejarah dan situs tsunami 3. Tersedianya sarana promosi wisata melalui peran duta wisata, media massa dan elekronika baik nasional maupun internasional 4. Tersedianya taman-taman kota, hutan kota dan ruang publik dalam mewujudkan Kota Hijau 5. Adanya dukungan penuh dari travel perjalanan, perhotelan, kuliner dan penyedia jasa lainnya dalam menarik wisatawan dalam dan luar negeri

Misi 6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik Dan Perlindungan Anak	
Tujuan: 1. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam ranah publik 2. Meningkatkan kepedulian tehadap perempuan dan perlindungan anak 3. Menguatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Mengwujudkan pencapaian program MDG's dalam bidang Gender dan Perlindungan anak	Sasaran: 1. Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik publik sebagai warga kota madani 2. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan perlindungan anak 3. Meningkatnya peran kelembangaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Terwujudnya pencapaian program MDG's kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak
Misi 7. Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota	
Tujuan: 1. Membina generasi muda menjadi aset yang dapat berperan dalam pembangunan kota 2. Menjadikan generasi muda sebagai aset dan kekuatan kota dalam pelaksanaan dan penegakan Syariat Islam 3. Mendorong kreatifitas dan jiwa interpreneurship bagi generasi muda	Sasaran: 1. Terwujudnya generasi muda yang mempunyai ide-ide dan pemikiran kreatif dalam membangun Kota 2. Terwujudnya generasi muda sebagai pendorong dan pioner dalam mewujudkan model kota madani 3. Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja

Telaahan Visi, Misi dan progam Walikota dan Wakil Walikota terpilih terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh pada Misi ke-5 dalam RPJM Kota Banda Aceh menyatakan untuk **Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang Islam**i.

Uraian lebih detil dalam mewujudkan misi ke-5 dapat dilihat sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Melanjutkan infrastruktur pariwisata yang Islami	Tersedianya pembangunan inprastruktur transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif	- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan - Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan - Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Sungai Danau dan	Peningkatan Pembangunan Insprastruktur Transportasi dan TIK

		Penyeberangan - Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor - Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan - rehabilatasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu linas - Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor*)* - Pengadaan perlengkapan TIK - Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor - Pembangunan sarana/prasarana angkutan massal Pembangunan Gedung Media Center dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan - Pembangunan sarana/prasarana parkir diluar badan jalan *(*	
	Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan terciptanya keamanan serta kenyaman bagi pengguna jalan/jasa. .	- Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang - Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya - Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal/pelabuhan - Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan - Penataan Tempat-tempat Pemberhentian/perparkiran Kenderaan pada Badan Jalan - Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas - Pengadaan Marka Jalan - Pengadaan Pengamanan dan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan - Pengadaan pengamanan dan penertiban juru parkir	Peningkatan sarana dan prasarana Transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa.

		- Pembangunan Traffic Light - Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardril) - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan perparkiran	
	terwujudnya kepemerintahan yang berbasis TIK.	- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi - Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi - Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika - Pengkajian dan penelitian bidang Informasi - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pembangunan Daerah - Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. - Pelatihan SDM Bidang Kominfo - Pembinaan Kelompok Informasi Gampong - Penyediaan pusat data base - Pembangunan jaringan TIK	perwujudan fasilitas dan SDM kepemerintahan yang berbasis TIK

3.3 Telaah Renstra Dishubkominfo dan Renstra Propinsi

Keterkaitan Rencana Stratejik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dengan dokumen perencanaan lintas instansi lainnya akan sangat berhubungan mengingat semua aplikasi hasil perencanaan tersebut akan bersinggungan langsung dengan tugas pokok, peran dan fungsi perhubungan, komunikasi dan informatika.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka peningkatan pembangunan Insprastruktur perhubungan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa serta mewujudkan SDM kepeminpinan yang berbasis TIK, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dihadapkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. kurangnya jumlah bangunan penunjang terminal angkutan darat dan pelabuhan penyeberangan Ulee lheue.
2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ
3. Masih rendahnya Kesadaran Pengguna jalan dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalu lintas Angkutan Jalan
4. Keterbatasan ruang parkir dan Pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi
5. Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik belum memadai
6. Kurangnya SDM Bidang Korespodensi (berita) dan TIK
7. Belum Tersedia sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah adalah merupakan tahap penting dalam penyusunan dokumen Rentra, visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang akan kita inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dalam mencapai kinerja pembangunan Bidang Transportasi, Komunikasi dan Informasi.

4.1.1. VISI

Visi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah : "***MEMBERIKAN LAYANAN TRANSPOSTASI DAN KOMUNIKASI YANG HANDAL DAN AKURAT BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI"***. Visi tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Banda Aceh merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh.

4.1.2. Misi

Adapun Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.*
2. *Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan;*
3. *Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh;*
4. *Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh;*
5. *Menciptakan sistem komunikasi yang profesional dan handal;*

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan . Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan profesional
2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan darat dan pelabuhan penyeberangan
3. Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh
4. Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan Kota Banda Aceh
5. Menyediakan data cepat, tepat dan akurat serta sistem komunikasi yang optimal berbasis Informasi dan Teknologi (IT)

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelayanan Publik
2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan Darat dan

Pelabuhan penyeberangan

3. Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh
4. Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat. Berbasis IT

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh pada lampiran IV.

4.3. Stategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti diklat Bidang Perhubungan, diklat kepemimpinan, dan teknis teknis lainnya
2. Membangun sarana dan prasarana transportasi angkutan Darat dan Pelabuhan penyeberangan.
3. Meningkatan jumlah fasilitas jalan guna ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh.
4. Menertibkan jalur trayek yang dilalui Angkutan kota dan melakukan pengawasan dan pengedalian guna peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh.
5. Meningkatkan Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat. Berbasis IT serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan,

atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagi berikut:

1. Mengikut sertakan Aparatur dalam segala bentuk Bimtek teknis guna meningkatkan SDM dan pelayanan publik
2. Meningkatkan pengelolaan terminal darat dan pelabuhan penyeberangan.
3. Melaksanakan penataan fasilitas jalan dan rekayasa lalulintas.
4. Meningkatkan pelayanan angkutan, kebijakan bidang transportasi, pengendalaian dan pengawasan berlalu lintas serta perparkiran.
5. Melakukan koordinasi, penerapan Informasi Teknologi dan kerja sama dengan Instasi terkait serta Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dishubkominfo untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
   - 1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional.
   - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman
   - 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
   - 1.9. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
   - 1.10. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas
   - 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   - 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   - 2.4. Pengadaan Mebeleur
   - 2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
   - 2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
   - 2.7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
   - 2.8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
   - 2.9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeluer

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi

3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.

3.3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4.2. Bintek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.2. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

5.3. Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

5.4. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.

6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

6.1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

6.2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

6.3. Rehabilatasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas.

7. Pelayanan Angkutan

7.1. Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

7.2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

7.3. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

7.4. penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

7.5. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

7.6. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

7.7. Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Kenderaan pada Badan Jalan

8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

8.1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

8.2. Pengamanan Marka Jalan

8.3. Pengadaan Trafig Light

8.4. Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

9.1. Pembangunan Gedung Terminal

10. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

10.1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi

10.2. Pembinaan dan Pengembandan Sumber Daya Informasi

10.2. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

10.3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

10.4. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika.

11. pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

11.1. Pengkajian dan penelitian bidang Informasi

12. Kerjasama Informasi dengan Media Masa

12.1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

12.2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah

12.3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

13. Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kominfo

13.1. Pelatihan SDM Bidang Kominfo

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dishubkominfo Kota Banda Aceh terlihat pada Lampiran V.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RPJM mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerah. Memperhatikan hal tesebut maka dokumen RPJM Kota Banda Aceh merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPJM menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis SKPD yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian Kinerja masing-masing SKPD yang berlandaskan kepada anggaran.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Kota Banda Aceh untuk kurun waktu yang sama berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan kordinasi antar lintas SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga pelaksanaan akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil guna kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Dinas Perhbungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berkoordinasi dengan Dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui musrembang, musrena dan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA).

Rincian indikator kinerja Perhbungan Kota Banda Aceh Aceh dengan mengacu pada RPJMD disajikan pada **Lampiran VI**.

BAB VII
PENUTUP

Perencanaan Stratejik (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategik yang menjadi landasan dan acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, memuat penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBK Banda Aceh.

Penyusunan dokumen Perencanaan Stratejik (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh Tahun 20012-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dishubkominfo Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung jawab	Lokasi
										Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan profesional	Meningkatnya Sumber daya Aparatur dan Pelayanan Publik	Tersedianya Aparatur yang berkualitas dalam pelayanan publik	1	07	01		*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan publik	*0*	*20%*	*1,661,684,200*	*20%*	*1,759,141,000*	*20%*	*2,263,588,000*	*20%*	*2,439,661,000*	*20%*	*2,610,225,250*	*100%*	*10,734,299,450*	*Dishubko minfo*	
			1	07	01	02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA	-	12 bln	421,000,000	12 bln	442,051,000	12 bln	550,008,000	12 bln	600,436,000	12 bln	642,254,500	60 bln	2,655,749,500		
			1	07	01	06	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya dan termenuhinya perizinan kend dinas/operasional	-		-	12 bln	22,000,000	12 bln	23,500,000	12 bln	24,675,000	12 bln	26,402,250	36 bln	96,577,250		
			1	07	01	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya alat-alat kebersihan	-	12 bln	25,319,000	12 bln	19,230,000	12 bln	25,080,000	12 bln	26,300,000	12 bln	28,141,000	60 bln	124,070,000		
			1	07	01	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	-	12 bln	18,685,200	12 bln	19,620,000	12 bln	25,000,000	13 bln	26,250,000	12 bln	28,087,500	60 bln	117,642,700		
			1	07	01	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	-	12 bln	55,725,000	12 bln	58,500,000	12 bln	70,000,000	14 bln	73,500,000	12 bln	78,645,000	60 bln	336,370,000		
			1	07	01	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	12 bln	7,181,000	12 bln	7,500,000	12 bln	10,000,000	15 bln	10,500,000	12 bln	11,235,000	60 bln	46,416,000		
			1	07	01	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya Makanan dan Minuman pegawai	-	11 bln	295,724,000	11 bln	310,500,000	11 bln	450,000,000	16 bln	500,000,000	11 bln	535,000,000	55 bln	2,091,224,000		
			1	07	01	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terpenuhinya undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	-	12 bln	150,000,000	12 bln	157,000,000	12 bln	250,000,000	17 bln	275,000,000	12 bln	294,250,000	60 bln	1,126,250,000		
			1	07	01	19	Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa	-	6 bln	5,250,000	6 bln	5,800,000	6 bln	10,000,000	6 bln	10,500,000	6 bln	11,235,000	30 bln	42,785,000		
			1	07	01	20	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran	tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran	-	12 bln	682,800,000	12 bln	716,940,000	12 bln	850,000,000	12 bln	892,500,000	12 bln	954,975,000	60 bln	4,097,215,000		
			1	07	02		*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	*0*	*20%*	*448,821,540*	*20%*	*802,000,000*	*20%*	*922,750,000*	*20%*	*1,010,500,000*	*20%*	*975,975,000*	*100%*	*4,160,046,540*	*Dishubko minfo*	
			1	07	02	05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional	9 kend	-	-	1 kend dinas	220,000,000	1 kend dinas	250,000,000	1 kend dinas	231,000,000	1 kend dinas	262,500,000	13 ken dinas	963,500,000		
			1	07	02	07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianta Perlengkapan Gedung Kantor	-	12 bln	258,239,540	12 bln	150,000,000	12 bln	170,000,000	12 bln	178,500,000	12 bln	187,425,000	60 bln	944,164,540		
			1	07	02	09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya Peralatan Gedung Kantor	-		-	12 bln	100,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	130,000,000	12 bln	136,500,000	48 bln	516,500,000		
			1	07	02	10	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	tersedianya Mebeleur kantor	-		-	12 bln	70,000,000	-	-	12 bln	100,000,000	-	-	22 bln	170,000,000		
			1	07	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	-		-	12 bln	50,000,000	12 bln	52,500,000	12 bln	56,000,000	12 bln	58,800,000	48 bln	217,300,000		
			1	07	02	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/operasional	terpeliharanya kenderaan dinas/operasional	-	12 bln	153,532,000	12 bln	160,000,000	12 bln	220,000,000	12 bln	231,000,000	12 bln	242,550,000	60 bln	1,007,082,000		
			1	07	02	26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	-	12 bln	-	12 bln	10,000,000	12 bln	25,000,000	12 bln	26,000,000	12 bln	27,300,000	60 bln	88,300,000		
			1	07	02	27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	-	12 bln	37,050,000	12 bln	37,000,000	12 bln	50,000,000	12 bln	52,500,000	12 bln	55,125,000	60 bln	231,675,000		
			1	07	02	29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	terpeliharanya mebeluer	-	-	-	12 bln	5,000,000	12 bln	5,250,000	12 bln	5,500,000	12 bln	5,775,000	48 bln	21,525,000		
			1	07	03		*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	*0*	*20%*	*129,100,000*	*20%*	*209,650,000*	*20%*	*226,250,000*	*20%*	*235,000,000*	*20%*	*220,500,000*	*100%*	*1,020,500,000*	*Dishubko minfo*	
			1	07	03	01	Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	tersedianya Mesin/Kartu Absensi	1 buah	-	-	1 buah	25,000,000	-	26,250,000	1 buah	25,000,000	-	-	3 buah	76,250,000		
			1	07	03	02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya	tersedianya pakaian dinas	-	137 psg	54,800,000	200 psg	150,000,000	200 psg	150,000,000	200 psg	157,500,000	200 psg	165,375,000	937 psg	677,675,000		
			1	07	03	03	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	tersedianaya pakaian kerja lapangan	-	230 jukir	46,900,000	220 jukir	34,650,000	220 jukir	50,000,000	220 jukir	52,500,000	220 jukir	55,125,000	1110 jukir	239,175,000		
			1	07	03	05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu	tersedianya pakaian dinas	-	137 stel	27,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	137 stel	27,400,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung jawab	Lokasi
										Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			1	07	05		*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	*15%*		-	*8%*	*50,000,000*	*8%*	*60,000,000*	*8%*	*63,000,000*	*8%*	*75,000,000*	*47%*	*248,000,000*	*Dishubko minfo*	
			1	07	05	03	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	terpenuhinya peg yg mengikuti Bimbingan Teknis Impiemtasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	5 org peg	50,000,000	5 org peg	60,000,000	5 org peg	63,000,000	5 org peg	75,000,000	20 org peg	248,000,000		
Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan Darat dan Pelabuhan penyeberangan	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan	1	07	15		*Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan*	*bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP*	*50%*	*2%*	*559,020,460*	*7%*	*670,000,000*	*7%*	*800,000,000*	*7%*	*875,000,000*	*7%*	*918,750,000*	*80%*	*3,822,770,460*	*Dishubko minfo*	
			1	07	15	01	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	tersedianya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	-	-	1 keg	120,000,000	1 keg	175,000,000	1 keg	200,000,000	1 keg	210,000,000	4 keg	705,000,000		
			1	07	15	06	Kegiatan Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	terpeliharanya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan	-	12 bln	559,020,460	12 bln	550,000,000	12 bln	625,000,000	12 bln	675,000,000	12 bln	708,750,000	60 bln	3,117,770,460		
			1	07	16		*Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ*	*bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan*	*15%*	*2%*	*207,000,000*	*2%*	*460,000,000*	*6%*	*645,500,000*	*6%*	*660,000,000*	*6%*	*693,000,000*	*37%*	*2,665,500,000*	*Dishubko minfo*	
			1	07	16	01	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor	-				50,000,000	12 bln	75,000,000	12 bln	10,000,000	12 bln	10,500,000	48 bln	145,500,000		
			1	07	16	04	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpeliharanya terminal/pelabuhan	-				200,000,000	12 bln	350,000,000	12 bln	400,000,000	12 bln	420,000,000	48 bln	1,370,000,000		
			1	07	16	05	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Terpeliharanya rambu-rambu lalu linas	-	12 bln	207,000,000	12 bln	210,000,000	12 bln	220,500,000	12 bln	250,000,000	12 bln	262,500,000	60bln	1,150,000,000		
Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh	Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh	Meningkatnya kesadaran pengguna jalan yang mematuhi rambu lalu lintas	1	07	17		*Program Peningkatan Pelayanan Angkutan*	*meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan*	*50%*	*4%*	*943,050,000*	*7%*	*1,060,000,000*	*6%*	*1,297,500,000*	*7%*	*1,306,125,000*	*6%*	*1,372,500,000*	*80%*	*5,979,175,000*	*Dishubko minfo*	
			1	07	17	04	Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	tersedianya plat, STUK dan stiker TUK	-	12 bln	441,650,000	12 bln	450,000,000	12 bln	472,500,000	12 bln	496,125,000	12 bln	522,000,000	60 bln	2,382,275,000		
			1	07	17	05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di jalan			-	12 bln	50,000,000	12 bln	75,000,000	12 bln	10,000,000	12 bln	10,500,000	48 bln	145,500,000		
			1	07	17	06	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	terciptanya kenyamanan penumpang angkutan	rutin	12 bln	501,400,000	12 bln	510,000,000	12 bln	650,000,000	12 bln	700,000,000	12 bln	735,000,000	60 bln	3,096,400,000		
			1	07	17	14	Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	-	-	-	1 keg	50,000,000	1 keg	100,000,000	1 keg	100,000,000	1 keg	105,000,000	4 keg	355,000,000		
			1	07	19		*Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas*	*bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan*	*70%*	*2%*	*2,524,743,970*	*3%*	*1,400,000,000*	*3%*	*1,485,000,000*	*3%*	*1,559,250,000*	*3%*	*1,637,212,500*	*84%*	*8,606,206,470*	*Dishubko minfo*	
			1	07	19	01	Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	tersedianya sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas		12 bln	1,119,220,970	12 bln	400,000,000	12 bln	435,000,000	12 bln	456,750,000	12 bln	479,587,500	60 bln	2,890,558,470		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung jawab	Lokasi
										Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan Kota Banda Aceh	Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh	Terlayaninya masyarakat yang menggunakan jasa trasportasi kota	1	07	19	02	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	tersedianya Marka Jalan		12 bln	1,009,443,000	12 bln	600,000,000	12 bln	630,000,000	12 bln	661,500,000	12 bln	694,575,000	60 bln	3,595,518,000		
			1	07	19	04	Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir	tersedianya petugas parkir	-	10 org	396,080,000	10 org	400,000,000	10 org	420,000,000	10 org	441,000,000	10 org	463,050,000	60 org	2,120,130,000		
			1	*07*	*18*		*Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan*	*bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik*	*65%*	*-*	*-*	*3%*	*300,000,000*	*3%*	*375,000,000*	*3%*	*400,000,000*	*3%*	*450,000,000*	*77%*	*1,525,000,000*	*Dishubko minfo*	
			1	07	18	01	Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)	terbangunnya fasilitas terminal		-	-	1 keg	300,000,000	1 keg	375,000,000	1 keg	400,000,000	1 keg	450,000,000	4 keg	1,525,000,000		
Menyediakan data cepat, tepat dan akurat serta sistem komunikasi yang optimal berbasis Informasi dan teknologi (IT)	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasisi IT	terpenuhinya data cepat, tepat dan akurat serta sistem komunikasi yang optimal berbasis Informasi dan teknologi (IT)	*1*	*25*	*15*		*Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa*	*terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronok*	*40%*	*3%*	*396,800,000*	*5%*	*655,000,000*	*5%*	*800,000,000*	*5%*	*895,220,000*	*5%*	*962,981,000*	*63%*	*3,710,001,000*	*Dishubko minfo*	
			1	25	15	02	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	terbinanya dan bertambah jaringan komunikasi dan informasi	-	-	-	10 %	100,000,000	10 %	120,000,000	10 %	125,000,000	10 %	131,250,000	40 %	476,250,000		
			1	25	15	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya informasi	tersedianya sumber daya kominfo	-	12 bln	90,000,000	12 bln	95,000,000	12 bln	125,000,000	12 bln	131,220,000	12 bln	137,781,000	60 bln	579,001,000		
			1	25	15	05	Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi	tersedianya alat studio dan komunikasi.	-	1 keg	149,900,000	1 keg	150,000,000	1 keg	180,000,000	1 keg	189,000,000	1 keg	198,450,000	5 keg	867,350,000		
			1	25	15	06	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	tersedianaya sarana dan prasarana informatika	-	12 bln	156,900,000	12 bln	160,000,000	12 bln	175,000,000	12 bln	240,000,000	12 bln	275,000,000	60 bln	1,006,900,000		
			1	25	15	07	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika	tersedianya Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika	-		-	1 keg	150,000,000	1 keg	200,000,000	1 keg	210,000,000	1 keg	220,500,000	4 keg	780,500,000		
			1	*25*	*16*		*Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi*	*terpenuhinya data base Infokom*	*0%*		*-*	*15%*	*100,000,000*	*15%*	*150,000,000*	*15%*	*157,500,000*	*15%*	*165,375,000*	*60%*	*572,875,000*	*Dishubko minfo*	
			1	25	16	01	Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan komunikasi	Terlaksananya penelitian penyusunan data base informasi dan komunikasi di Kota Banda Aceh	-		-	1 keg	100,000,000	1 keg	150,000,000	1 keg	157,500,000	1 keg	165,375,000	4 keg	572,875,000		
			1	*25*	*18*		*Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa*	*terserapnya informasi pelaksanaan kepemerintahan kepada masyarakat*	*50%*	*2%*	*407,772,000*	*6%*	*740,000,000*	*6%*	*845,000,000*	*6%*	*890,000,000*	*6%*	*958,500,000*	*76%*	*3,841,272,000*	*Dishubko minfo*	
			1	25	18	01	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	tersampaikan informasi kepada masyarakat		12 bln	407,772,000	12 bln	500,000,000	12 bln	580,000,000	12 bln	600,000,000	12 bln	630,000,000	60 bln	2,717,772,000		
			1	25	18	02	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersebarnya informasi penyelenggaraan daerah kepada masyarakat			-	12 bln	100,000,000	12 bln	100,000,000	12 bln	120,000,000	12 bln	150,000,000	48 bln	470,000,000		
			1	25	18	03	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terselenggaranya kegiatan komunikasi sosial antar masyarakat secara simultan			-	12 bln	140,000,000	12 bln	165,000,000	12 bln	170,000,000	12 bln	178,500,000	48 bln	653,500,000		
Jumlah											7,277,992,170		8,205,791,000		9,870,588,000		10,491,256,000		11,040,018,750		46,885,645,920		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung jawab	Lokasi
							Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21

Banda Aceh, 20 Maret 3013
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si
Nip. 19620714 198607 1 002